

Judul : China bisa jadi contoh, sosialisasi nilai-nilai Pancasila bisa lewat film
Tanggal : Sabtu, 20 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

China Bisa Jadi Contoh

Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila Bisa Lewat Film

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Riyono mendorong agar Pancasila hadir secara kontekstual dan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mesti bisa dihayati tidak hanya oleh generasi tua, tapi juga generasi mendatang.

Riyono menilai, ideologi Pancasila sudah selesai. Pancasila sudah jadi kesepakatan bersama untuk menjaga Indonesia hingga generasi mendatang. "PR terbesar sekarang adalah bagaimana menjadikan Pancasila hadir dengan kekinian dan relevansinya hadir," kata Riyono usai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Gedung DPR, Kamis (18/9/2025).

Dia menjelaskan, tantangan utama adalah membuat nilai-nilai Pancasila lebih renyah dan mudah diobjektifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Silasila seperti "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan "Persatuan

Indonesia", harus lahir dalam kebiasaan nyata masyarakat.

"Objektifikasi inilah yang perlu masuk dalam rencana UU kita agar terlihat aplikatif, kontekstual, dan diakui hingga level global," ucap politikus PKS itu. Dia berharap, RUU PIP yang sedang dibahas mampu menjadikan Pancasila tidak sekadar teks. "Tapi menjadi panduan hidup yang relevan lintas generasi," katanya.

Anggota Baleg Sugiat Santoso menambahkan, Pancasila harus jadi pedoman dalam setiap aspek, mulai dari pendidikan, konten digital, hingga cara berbangsa. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, individu maupun organisasi mengamalkan Pancasila sebagai fardu ain, atau tidak bisa diwakilkan orang lain.

"Kalau dalam terminologi fikih Islam, wajib. Kalau nggak ada, dosa gitu kan. Bagaimana caranya? Nggak apa-apa kalau kita harus belajar misalnya dari



Riyono

Orde Baru," kata Sugiat.

Sugiat mencontohkan aturan di masa lalu, siswa tidak bisa naik kelas jika nilai Pendidikan Moral Pancasila di bawah enam. Aturan seperti itu bisa dipertimbangkan lagi. "Kalau ni-

lainya tidak enam ke atas, ya tidak naik kelas. Saya pikir itu bisa diberlakukan lagi," ujarnya.

Sugiat juga menyoroti rekutmen PNS, BUMN, maupun perusahaan swasta. Proses seleksi harus memastikan calon pegawai memiliki ideologi yang sejalan dengan Pancasila. Jangan sampai kasus masuknya paham ekstrem kanan ke BUMN kembali terulang.

Selanjutnya, dia mengangakat soal strategi sosialisasikan Pancasila lewat konten digital. Negara China bisa jadi contoh mendoktrin rakyatnya lewat film sebagai sebuah negara besar dan adidaya. Pertarungan ideologi saat ini ada di konten-konten media digital.

"Kita belajar dari China, bagaimana membangun ideologinya, filmnya Ip Man, itu doktrin ideologi. China mendoktrin rakyatnya bisa mengalahkan bangsa-bangsa besar," papar legislator asal Dapil Sumatera

Utara III itu.

Dia lalu membandingkan dengan film Indonesia yang dinilainya kurang Pancasila-lais, seperti sejumlah film bergenre horor. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seharusnya bisa masuk ke ranah tersebut untuk memastikan perang ideologi dilakukan dengan strategi yang holistik dan menyeluruh.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang dalam pembahasan tersebut hadir sebagai akademisi mengatakan, negara berperan penting dalam menjaga dan menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurutnya, perjalanan Pancasila mengalami pasang surut di setiap era pemerintahan.

"Fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat vital. Karena itu, kehadiran negara dalam membangun dan menyosialisasikan ideologi bangsa adalah hal yang mutlak," tegas Basarah. ■ **PVB**